**GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Surat Kabar** | **:** | **Jurnal Nasional** | **Tgl/Bln/Thn** | **:** | **12 Desember 2007** |
| **Subyek** | **:** | **Perubahan Iklim** | **Hari** | **:** | **Rabu** |
| | | | **Halaman** | **:** | **03** |


# Antisipasi Perubahan Iklim dengan Kebijakan Fiskal

ANCAMAN terhadap perubahan iklim (*climate change*) harus dihadapi dengan mengoptimalkan kebijakan fiskal. Pemberian insentif dan kemudahan fiskal merupakan syarat utama untuk mendorong peningkatan investasi swasta di bidang lingkungan.

Menteri Negara (Menneg) Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta yang mewakili delegasi Indonesia mengungkapkan hal itu dalam Pertemuan Menteri-Menteri Keuangan (High Level Event on Climate Change for Finance Minister) di Jimbaran, Bali, Selasa (11/12).

Dia mengatakan, Indonesia melihat perubahan iklim sebagai isu pembangunan, oleh karena itu persoalan lingkungan tidak boleh bertentangan dengan target utama pembangunan nasional, yakni *pro-growth*, *pro-poor* dan *pro-job*. Pasalnya, di luar persoalan lingkungan, Indonesia juga sangat butuh menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. “Kami percaya bahwa kebijakan fiskal dapat menjadi langkah yang sangat kuat untuk mencapai tujuan ini (antisipasi perubahan iklim) dan mengaitkannya dengan upaya pembangunan,” katanya.

Menurut dia, pengaruh kebijakan fiskal (Menteri Keuangan) untuk mempengaruhi perubahan iklim dapat diupayakan melalui empat cara. Pertama, melalui kebijakan terkait investasi yakni yang berhubungan dengan iklim investasi, perbankan, pasar asuransi dan pasar modal.

Kedua, melalui kebijakan terkait pemberian subsidi dan pajak. Pengenaan pajak, pemberian royalti, subsidi, dan insentif dapat diarahkan untuk mendukung isu perubahan iklim. Ketiga, melalui pengelolaan anggaran pemerintah lewat prioritas belanja, investasi langsung, dan pengeluaran untuk perbaikan lingkungan.

Keempat, pemerintah sebenarnya juga dapat menetapkan peraturan untuk mendukung masalah perubahan iklim. Baik melalui penetapan zonasi untuk penggunaan lahan, manajemen lingkungan, membangun standar, termasuk standar emisi.

Dia menambahkan, empat rencana dan tindakan yang akan diambil Indonesia terkait perubahan iklim. Pertama, berupa rencana aksi nasional untuk perubahan iklim yang dilakukan melalui upaya pengurangan subsidi minyak.

Kedua, rencana pengurangan emisi dari penggundulan hutan yang dilakukan melalui peningkatan belanja pemerintah untuk lingkungan. Ketiga, untuk mendiversifikasi sumber energi yang akan didorong melalui pemberian insentif untuk teknologi ramah lingkungan. Sedangkan keempat, strategi untuk mengembangkan pertumbuhan sektor yang rendah polusi.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

**Insentif dan Disinsentif**

Staf Khusus Menteri Keuangan M Chatib Basri mengatakan, pentingnya diterapkan mekanisme insentif dan disinsentif oleh masing-masing negara untuk mendorong peran swasta dalam isu perubahan iklim. “Kalau mau menyelesaikan persoalan, kita melihat apa insentif dan disinsentifnya. Kalau mengharapkan bantuan komunitas internasional (*international community*) hanya uang, jumlahnya tidak besar,” ujarnya di kesempatan yang sama.

Menurut Chatib yang juga menjadi anggota delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut, kemampuan pemerintah untuk mendanai isu perubahan iklim juga sangat terbatas. “Sektor swasta tetap paling besar, tetapi mereka kan hanya mau masuk kalau ada insentif,” kata dia menjelaskan.

Oleh karena itu, untuk mendukung pengembangan teknologi ramah lingkungan, menurut dia, perlu ada kelonggaran pajak atau bea masuk. Sehingga impor untuk pengembangan teknologi ramah lingkungan bisa dipermudah.

Di sisi lain, pemerintah juga bisa mendorong swasta untuk meninggalkan teknologi yang tidak ramah lingkungan melalui penerapan pajak karbon. “Atau bikin karbon market, mereka yang emisinya besar bisa jual apakah melalui pasar modal atau apa,” katanya.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP